

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya kebijakan deregulasi perbankan pada tahun 1983 dan masih berjalan hingga sekarang banyak bermunculan bank-bank baru. Para pengusaha perbankan diberikan kebebasan oleh Bank Indonesia (BI) untuk membuka cabang disetiap daerah. Pemberian kemudahan ini telah disambut gembira oleh para bankir untuk mengembangkan usahanya dibidang perbankan. Dampak dari pemunculan bank-bank baru menambah persaingan yang ketat didalam dunia perbankan nasional. Sehingga bank-bank tersebut harus menggiatkan usahanya agar menjadi lembaga keuangan yang baik dan sehat.

Salah satu tujuan dari diberlakukannya deregulasi pada perbankan adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang memberikan dorongan untuk menjadikan persaingan yang sehat diantara lembaga keuangan bank dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Pengelola bank didalam melakukan usahanya senantiasa menjaga keseimbangan antara rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas yang cukup serta kebutuhan permodalan juga harus yang memadai.

Kondisi perbankan pada era tahun 1990-an dalam keadaan aman dan terkendali. Karena indikator tingkat kesehatannya yang mencukupi. Para penanam modal atau investor banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Karena tingkat pengembalian modal dan keuntungan yang didapatkan sangat lumayan.

Disamping itu kondisi perekonomian dan perpolitikan dinegara ini pada saat itu juga mendukung untuk mengembangkan usahanya.

Sesuai dengan UU no: 7 tahun 1992 yang berisi aturan-aturan tentang rahasia bank telah diamandemen dengan UU no: 10 tahun 1998 yang berisi sektor perbankan memiliki peranan yang penting sebagai suatu lambaga intermediasi untuk menunjang perekonomian nasional. Dengan demikian maka perbankan di Indonesia memegang peranan yang sangat mendukung bagi pertumbuhan perekonomian negara.

Keterpurukan perekonomian dinegara Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 dampaknya masih dirasakan sampai sekarang ini. Bagi para pelaku ekonomi keadaan seperti ini dirasakan kurang begitu menguntungkan untuk kelangsungan usahanya. Banyak investor yang membatasi dan mencabut bahkan mengurungkan niatnya untuk menanamkan modal didalam negeri. Karena disebabkan kurang terjaminnya tingkat keuntungan dan pengembalian modal serta tidak adanya jaminan terhadap simpanan dari masyarakat atau nasabah.

Fenomena krisis ekonomi dirasakan sangat memberatkan dalam dunia usaha, khususnya pada bidang perbankan dan pada umumnya usaha skala makro yang akhirnya membawa ke kebangkrutan usaha. Krisis ekonomi tersebut telah mengakibatkan bank-bank tidak dapat beroperasi secara normal, sehingga mengharuskan bank sentral (BI) memberikan uluran tangan atau subsidi kepada suatu bank dengan melalui kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). (Dendawijaya, 2000: 170).

Program restrukturisasi perbankan nasional telah dilaksanakan antara lain melalui mekanisme Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), program penjaminan pemerintah dan program rekapitalisasi perbankan. Dalam perkembangannya masih terdapat bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan sistem perbankan nasional. Sehubungan dengan itu terhadap bank perlu dilakukan langkah-langkah tertentu, seperti: pengawasan normal, intensif dan khusus agar sistem perbankan yang sehat dapat tercipta secara efektif. Bagi bank yang masih mempunyai prospek untuk menjadi sehat perlu dilakukan langkah perbaikan dan penyehatan. Sedangkan bagi bank yang tidak sehat perlu dilakukan kebijakan penyelesaiannya

Oleh karena itu perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas dan transparan mengenai tingkat kesehatan bank dalam kegiatan usahanya, serta langkah koordinasi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi perbankan nasional. Sesuai dengan program rekapitalisasi perbankan, maka pada akhir tahun 2001 setiap perbankan diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% atau lebih besar dari itu.

Bank dapat ditetapkan dengan status bank dalam penyehatan (BDP) apabila bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki terutama dari aspek permodalannya. Selama proses penyehatan bank oleh BPPN dan BI dilakukan terutama yang terkait dengan perkembangan indikator utama kinerja bank yaitu kinerja permodalan, rasio likuiditas (giro wajib minimum), non-

performing loan (NPL), ketentuan prudensial dan indikasi pencapaian rencana kerjanya. Apabila kondisinya tidak terlihat membaik dan program penyehatan telah selesai dilakukan dan dinyatakan tidak berhasil, maka status BDP dapat berubah menjadi status bank beku kegiatan usaha (BBKU) atau bank likuidasi.

Meskipun kondisi perekonomian belum pulih benar, performan perbankan nasional sudah menampakan perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya sejumlah indikator perbankan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Dapat dilihat dari kemampuan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian kredit. Baik untuk kredit usaha kecil dan menengah (UKM), konsumers maupun korporat. Sekalipun kinerja perbankan nasional menunjukkan perkembangan yang membaik, namun belum berhasil menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi dana.

Kondisi ini dapat dilihat dari besarnya kelebihan dana yang dimiliki oleh perbankan. Sementara itu, pemberian kredit kepada dunia usaha juga masih sangat terbatas jumlahnya. Maju mundurnya perekonomian suatu negara akan sangat tergantung kepada kinerja keuangan perbankan nasional. Terkendalinya kondisi perbankan juga tidak terlepas dari kondisi yang baik antara sektor riil, fiskal dan moneter. Kinerja keuangan pada suatu bank dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut, apakah bank tersebut sebagai bank yang

... kesehatan bank tersebut atau bahkan malah tidak sehat

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi penghimpun dana dalam bentuk simpanan nasabah dan penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit bagi para pengusaha maupun masyarakat yang membutuhkannya (Kasmir, 2000). Tingkat kesehatan perbankan menjadi suatu tanggung jawab bagi semua pihak yang terkait, baik pemilik modal, pengelola bank, pengguna jasa bank (nasabah) dan pengawas perbankan (BI). Bank juga harus memberikan rasa percaya kepada masyarakat sehingga tingkat kesehatannya bank perlu dijaga. Dengan demikian maka bank mampu beroperasi dengan standar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) (Dendawijaya, 2000).

Tingkat kesehatan bank dapat digunakan sebagai salah satu pemantau perkembangan dan penentu arah serta kebijakan bank sentral (BI) terhadap bank-bank umum lainnya. Laporan keuangan diharapkan dapat mampu memberikan gambaran keadaan suatu perusahaan. Bank sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat perlu menyampaikan laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran dan mengetahui mengenai situasi dan kondisi bank tersebut.

Dalam menentukan tingkat kesehatan, diperlukan suatu penilaian terhadap kondisi tingkat kesehatan perbankan. Untuk mengetahui kinerjanya dan membandingkan tingkat kesehatan bank dengan melihat hasil laporan keuangan dari periode tahun ke periode tahun yang berikutnya. Untuk mengukur tingkat kesehatan bank dapat menggunakan cara atau metode CAMEL yang terdiri dari: (Capital, Asset, Manajemen, Earning, Likuiditas).

Dari hasil uraian diatas pada latar belakang tersebut maka dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membahas mengenai tingkat kesehatan pada lembaga keuangan bank. Dengan demikian maka penulis akan mengambil judul **"Analisis Tingkat Kesehatan Perbankan Pada Bank Lippo, Bank Tabungan Negara (BTN) Dan Bank Internasional Indonesia (BII)"** dengan studi kasus laporan keuangan pada tahun 2001 – 2003.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan adanya keterbatasan yang dihadapi oleh penulis baik waktu, data dan informasi maupun biaya, maka penulis membatasi permasalahan ini pada 3 lembaga keuangan bank yang ada di Indonesia yaitu: Bank Lippo, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Internasional Indonesia (BII). Dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2001, 2002 dan 2003. Penulis juga membatasi metode analisis data dengan menggunakan metode CAMEL.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka penulis dapat merumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank pada Bank Lippo.
2. Bagaimana tingkat kesehatan bank pada Bank Tabungan Negara (BTN).
3. Bagaimana tingkat kesehatan bank pada Bank Internasional Indonesia (BII).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada Bank Lippo.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada Bank Tabungan Negara (BTN)
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada Bank Internasional Indonesia (BII).

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk penulis

Penelitian ini adalah sebagai penerapan teori dan konsep yang telah didapatkan dari perguruan tinggi selama ini.

2. Untuk lembaga dan instansi yang terkait

Sebagai bahan pertimbangan, saran serta masukan untuk menentukan arah kebijakan bagi otoritas moneter dalam mengambil langkah dan tindakan penyehatan perbankan nasional.

3. Untuk peneliti dan penulis selanjutnya

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian serta sebagai acuan bagi peneliti dan penulis yang selanjutnya.